

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI.....  | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 2  |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 2  |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 3  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 4  |
| 1.4Sistematika Penulisan.....  | 5  |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN<br>BERKENAN .....                | 6  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun<br>Berkenan.....       | 6  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....                         | 19 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan<br>Informatika..... | 21 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023 .....                                 | 21 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....                             | 29 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....   | 29 |
| 3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika .....   | 29 |
| 3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara .....   | 32 |
| 3.1.3 Badan Pusat Statistik.....   | 32 |
| 3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.....   | 32 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika .....                          | 34 |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....   | 36 |
| BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA .....       | 48 |
| BAB V PENUTUP.....   | 62 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.

Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini didasarkan atas hasil evaluasi renja OPD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan

kegiatan dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- h. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- j. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- m. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini antara lain untuk :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II: EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun berkenan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2023

Bab III : TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN BERKENAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun berkenan**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berkenan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 terdiri dari 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**  
**PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D JUNI 2023**

**NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| No | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                       | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2 |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |   |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2023 |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 |                  | Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 |     | Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab |    |              |    |             |
|----|---------|--|---|---|----------------|--|----|---|---------------|---------------------------------|---------------|---|----|--|----|---|------------------|---|-----|---------------------------------------|----|--------------|----|-------------|
|    |         |  |   | K   | Rp             | K  | Rp | K   | Rp            | K                               | Rp            | K | Rp | K  | Rp | K   | Rp               | K   | Rp  |                                       |    |              |    |             |
| 1  | 2       | 3  | 4   | 5   |                | 6  |    | 7   |               | 8                               |               | 9 |    | 10   |    | 11  |                  | 12  |     | 13=6+12                               |    | 14=13/5*100% |    | 15          |
|    |         |  |   | K   | Rp             | K  | Rp | K   | Rp            | K                               | Rp            | K | Rp | K  | Rp | K   | Rp               | K   | Rp  | K                                     | Rp | K            | Rp |             |
| 1  |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |   | -   | 11,048,701,572 | 7,038,799,444  |    | 2,215,312,751   | 717,738,839   |                                 | 1,239,001,877 | - |    | -  |    | 1,956,740,716   | 8,995,540,160    | 56%   | 53% |                                       |    |              |    | Sekretariat |
| 2  |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       |   |   | 8,151,796,920  | 51 5,758,730,725   | 8  | 1,807,522,399   | 4 585,483,306 | 5                               | 1,015,318,511 | - | -  | -  | -  | 34 1,600,801,817                                      | 7,359,532,542    | 86%   | 90% |                                       |    |              |    | Sekretariat |
| 1  |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan | 42 bulan  | 8,148,052,920  | 28 5,756,234,725   | 8  | 1,807,522,399   | 4 585,483,306 | 4                               | 1,015,318,511 |   |    |  |    | 8 1,600,801,817                                       | 36 7,357,036,542 | 86%   | 90% |                                       |    |              |    | Sekretariat |

|   |  |  |  |                |             |       |             |     |             |     |            |     |            |   |   |   |       |             |       |             |     |     |             |
|---|--|--|--|----------------|-------------|-------|-------------|-----|-------------|-----|------------|-----|------------|---|---|---|-------|-------------|-------|-------------|-----|-----|-------------|
|   |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 25 orang/bulan |             |       |             |     |             |     |            |     |            |   |   |   | 25    |             |       |             |     |     |             |
| 3 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |                | 667,209,252 | 3,379 | 405,920,987 | 743 | 168,670,550 | 564 | 60,953,140 | 535 | 86,348,236 | - | - | - | 1,093 | 147,301,376 | 4,441 | 553,222,363 | 83% | 77% | Sekretariat |
| 1 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan  | 4 jenis        | 24,445,002  | 4     | 16,287,986  | 4   | 4,074,000   |     | 1,181,000  |     | 2,760,000  |   |   |   | 4     | 3,941,000   | 4     | 20,228,986  | 83% | 83% | Sekretariat |
|   |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket        |             |       |             |     |             |     |            |     |            |   |   |   |       |             |       |             |     |     |             |
| 2 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan   | 7 jenis        | 84,000,000  | 7     | 43,975,000  | 7   | 12,670,550  | 7   | 5,396,000  | 7   | 6,000,000  |   |   |   | 7     | 11,396,000  | 7     | 55,371,000  | 83% | 66% | Sekretariat |
|   |  |  | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat                             | 2 jenis        |             |       |             |     |             |     |            |     |            |   |   |   |       |             |       |             |     |     |             |
|   |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 9 paket        |             |       |             |     |             |     |            |     |            |   |   |   |       |             |       |             |     |     |             |
| 3 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             | 3 jenis        | 38,999,250  | 3     | 21,802,500  | 3   | 7,500,000   | 3   | 1,683,200  | 3   | 4,997,600  |   |   |   | 3     | 6,680,800   | 3     | 28,483,300  | 83% | 73% | Sekretariat |



|   |  |   |  |             |             |     |             |      |             |     |            |    |            |   |   |   |    |             |     |             |     |     |             |      |       |
|---|--|---|--|-------------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-----|------------|----|------------|---|---|---|----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|------|-------|
|   |  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 paket     |             | 3   |             | 3    |             |     |            |    |            |   |   | 3 |    |             |     |             |     |     |             |      |       |
| 4 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      | jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah                      | 380 ok      | 519,765,000 | 351 | 323,855,501 | 65   | 144,426,000 | 40  | 52,692,940 | 25 | 72,590,636 |   |   |   | 65 | 125,283,576 | 416 | 449,139,077 | 83% | 86% | Sekretariat |      |       |
|   |  |   | jumlah makan minum rapat yang disediakan   | 6,000 ok    |             |     |             | 3000 |             | 650 |            |    |            |   |   |   |    |             | 500 |             |     |     |             | 1000 | 4,000 |
|   |  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 250 laporan |             |     |             |      |             |     |            |    |            |   |   |   |    |             |     |             |     |     |             |      |       |
| 5 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |             | 954,563,400 | 9   | 586,618,732 | 6    | 144,866,002 | 6   | 53,393,393 | 6  | 77,952,930 | - | - | - | 9  | 131,346,323 | 6   | 717,965,055 | 83% | 76% | Sekretariat |      |       |
| 1 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | jumlah tagihan rekening yang di bayarkan   | 3 rekening  | 328,321,800 | 3   | 202,134,709 | 3    | 55,000,002  | 3   | 25,106,305 | 3  | 24,087,298 |   |   |   | 6  | 49,193,603  | 3   | 251,328,312 | 83% | 77% | Sekretariat |      |       |
|   |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 6 laporan   |             |     |             | 3    |             |     |            |    |            |   |   |   |    |             |     |             |     |     |             |      |       |

|   |  |   |  |           |                    |           |                    |           |                   |           |                   |           |                   |          |          |          |          |           |                   |           |                    |            |            |             |
|---|--|---|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 2 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan  | 3 jenis   | 626,241,600        | 3         | 384,484,023        | 3         | 89,866,000        | 3         | 28,287,088        | 3         | 53,865,632        |          |          |          |          | 3         | 82,152,720        | 3         | 466,636,743        | 83%        | 75%        | Sekretariat |
|   |  |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 8 orang   |                    |           |                    |           |                   |           |                   |           |                   |          |          |          |          |           |                   |           |                    |            |            |             |
|   |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6 laporan |                    |           |                    |           |                   |           |                   |           |                   |          |          |          |          |           |                   |           |                    |            |            |             |
| 6 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |  |           | <b>507,888,000</b> | <b>22</b> | <b>286,033,000</b> | <b>22</b> | <b>94,253,800</b> | <b>22</b> | <b>17,909,000</b> | <b>22</b> | <b>59,382,200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>16</b> | <b>77,291,200</b> | <b>16</b> | <b>363,324,200</b> | <b>71%</b> | <b>64%</b> | Sekretariat |
| 1 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 unit    | 268,706,000        | 7         | 150,922,400        | 7         | 41,490,800        | 7         | 16,704,000        | 7         | 22,197,000        |          |          |          |          | 7         | 38,901,000        | 7         | 189,823,400        | 83%        | 71%        | Sekretariat |
| 2 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 unit    | 13,440,000         | 7         | 5,104,350          | 7         | 295,000           | 7         | -                 | 7         | 76,200            |          |          |          |          | 7         | 76,200            | 7         | 5,180,550          | 67%        | 39%        | Sekretariat |

|    |  |  |   |      |         |               |      |               |      |               |    |             |    |             |   |      |      |             |      |               |      |     |             |
|----|--|--|---|------|---------|---------------|------|---------------|------|---------------|----|-------------|----|-------------|---|------|------|-------------|------|---------------|------|-----|-------------|
| 3  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                       | 1    | unit    | 141,148,000   | 1    | 81,213,000    | 1    | 31,868,000    | 1  | -           | 1  | 31,734,000  | - | -    | 1    | 31,734,000  | 1    | 112,947,000   | 67%  | 80% | Sekretariat |
| 4  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 7    | jenis   | 84,594,000    | 7    | 48,793,250    | 7    | 20,600,000    | 7  | 1,205,000   | 7  | 5,375,000   | - | -    | 1    | 6,580,000   | 1    | 55,373,250    | 67%  | 65% | Sekretariat |
|    | Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis teknologi informasi |  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 2.6  |         |               |      |               |      |               |    |             |    |             |   | 2.81 |      |             | 2.81 |               |      |     | E-Gov       |
| II |  | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA   | indeks implementasi tata kelola SPBE  | 2.15 |         | 8,561,604,150 | 2.20 | 5,564,263,000 | 2.30 | 1,386,825,400 | -  | 482,710,010 | 25 | 406,880,544 | - | -    | 2.20 | 889,590,554 | 2.20 | 6,453,853,554 | 96%  | 72% | E-Gov       |
|    |  |  | indeks implementasi layanan SPBE  | 3.55 |         |               | 3.37 |               | 3.55 |               |    |             |    |             |   | 3.37 |      |             | 3.37 |               | 95%  |     |             |
| 8  |  | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi  | 20   | layanan | 8,561,604,150 | 18   | 5,564,263,000 | 20   | 1,386,825,400 |    | 482,710,010 | 25 | 406,880,544 | - | -    | -    | 889,590,554 |      | 6,453,853,554 | 92%  | 72% | E-Gov       |
| 1  |  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik           | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi  | 20   | layanan | 1,093,971,600 | 18   | 612,178,944   | 20   | 159,593,000   | 18 | 43,132,156  | 18 | 71,557,234  | - | -    | 2    | 114,689,390 | 20   | 726,868,334   | 100% | 66% | E-Gov       |

|     |  |   |  |            |                   |            |                   |           |                   |          |                  |          |                  |           |          |            |                  |            |                   |             |            |              |
|-----|--|---|--|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|----------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|
|     |  |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 7 orang    |                   |            |                   |           |                   |          |                  |          |                  |           | 7        |            |                  |            |                   |             |            |              |
|     |  |   | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     | 20 unit    |                   |            |                   |           |                   |          |                  |          |                  |           | 20       |            |                  |            |                   |             |            |              |
| 2   |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola  | 7 jenis    | 7,467,632,550     | 7          | 4,952,084,056     | 7         | 1,227,232,400     | 7        | 439,577,854      | 7.00     | 335,323,310.00   | -         | -        | 7          | 774,901,164      | 7          | 5,726,985,220     | 83%         | 77%        | E-Gov        |
|     |  |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 14 orang   |                   |            |                   |           |                   |          |                  |          |                  |           | 14       |            |                  |            |                   |             |            |              |
|     |  |   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 2 dokumen  |                   |            |                   |           |                   |          |                  |          |                  |           | 1        |            |                  |            |                   |             |            |              |
| III |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI</b>                         | <b>% sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital</b>                                       | <b>100</b> | <b>66,240,000</b> | <b>100</b> | <b>32,240,600</b> | <b>89</b> | <b>11,942,000</b> | <b>-</b> | <b>1,968,750</b> | <b>1</b> | <b>1,600,000</b> | <b>89</b> | <b>-</b> | <b>100</b> | <b>3,568,750</b> | <b>100</b> | <b>35,809,350</b> | <b>100%</b> | <b>32%</b> | <b>E-Gov</b> |

|    |   |  |   |            |               |       |               |      |               |   |             |    |             |   |   |   |    |               |    |               |      |     |       |
|----|---|--|---|------------|---------------|-------|---------------|------|---------------|---|-------------|----|-------------|---|---|---|----|---------------|----|---------------|------|-----|-------|
| 9  |   | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | jumlah peserta pelatihan  |            | 66,240,000    | -     | 32,240,600    | 24   | 11,942,000    | - | 1,968,750   | 1  | 1,600,000   | - | - | - | 24 | 3,568,750     | 1  | 35,809,350    | 50%  | 32% | E-Gov |
| 2  |   | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik | jumlah pelatihan  | 1 kegiatan | 56,340,000    | 1     | 32,240,600    | 1    | 11,942,000    | - | 1,968,750   | 1  | 1,600,000   | 0 | - | - | 1  | 3,568,750     | 1  | 35,809,350    | 100% | 64% | E-Gov |
|    |   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2 laporan  |               |       |               |      |               |   |             |    |             |   |   |   |    |               |    |               |      |     |       |
|    | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik |  | Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik   | 87         |               | 92,3% |               | 100% |               | - |             | -  |             | - |   |   |    |               |    |               | 0%   |     | IKP   |
| IV |   | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik  | 50         | 7,406,715,302 | 52,67 | 4,118,229,376 | 45   | 1,488,228,250 | - | 412,012,882 | 50 | 594,467,195 | - | - | - | 50 | 1,006,480,077 | 50 | 5,124,709,453 | 100% | 62% | IKP   |

|    |  |   |   |       |               |        |               |        |               |     |             |         |             |   |   |         |         |               |         |               |      |     |     |
|----|--|---|---|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|-------------|---------|-------------|---|---|---------|---------|---------------|---------|---------------|------|-----|-----|
| 10 |  | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang  | 85000 | 7,406,715,302 | 40,000 | 4,118,229,376 | 80,000 | 1,488,228,250 | -   | 412,012,882 | 156,388 | 594,467,195 | - | - | 243,846 | 156,388 | 1,006,480,077 | 156,388 | 5,124,709,453 | 184% | 62% | IKP |
| 1  |  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                            | jumlah konten videotron   | 2400  | 809,872,902   | 2,445  | 582,859,631   | 200    | 132,684,100   | 219 | 43,311,972  | 266     | 64,242,531  | - | - | -       | 485     | 107,554,503   | 2,930   | 690,414,134   | 122% | 85% | IKP |
|    |  |   | Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik   | 24    |               | 23     |               | 24     |               | 24  |             | -       |             | - | - |         | 24      |               | 24      |               | 100% |     |     |
|    |  |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan  | 5     |               |        |               |        |               |     |             |         |             |   |   |         | 5       |               |         |               |      |     |     |
|    |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                   | 2     |               |        |               |        |               |     |             |         |             |   |   |         | 1       |               |         |               |      |     |     |
| 2  |  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial | 2700  | 3,087,588,200 | 2,472  | 1,449,323,947 | 330    | 200,296,000   | 334 | 43,609,816  | 217     | 77,309,224  | - | - | -       | 551     | 120,919,040   | 3,023   | 1,570,242,987 | 112% | 51% | IKP |

|   |  |  |  |            |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     |   |    |   |    |    |     |    |
|---|--|--|--|------------|------------|---|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----|-----|-----|---|----|---|----|----|-----|----|
|   |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif                             | 4 kali                                   |            |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     |   |    |   |    |    |     |    |
|   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 2 dokumen                                |            |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     |   |    |   |    |    |     |    |
| 3 |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah KIM yang aktif                    | 6 kelompok | 99,390,000 | 4 | 26,970,900 | 1 | 28,403,750 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 5 | 26,970,900 | 83% | 27% | IKP |   |    |   |    |    |     |    |
|   |  |  | jumlah konten positif                    | 40 konten  |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     | - | 10 | 0 | 20 | 20 | 0%  | 0% |
|   |  |  | Jumlah media tradisional yang dibina     | 3 kelompok |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     | 1 | 0  | 0 | 1  | 1  | 33% |    |
|   |  |  | Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan | 2 kegiatan |            |   |            |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |     |     |     | 1 | 0  | 0 | 0  | 1  | 50% |    |

|   |  |   |   |               |   |               |   |               |   |             |             |    |     |    |             |   |               |     |     |     |  |  |
|---|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|-------------|-------------|----|-----|----|-------------|---|---------------|-----|-----|-----|--|--|
|   |  |   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 2 dokumen     |   |               |   |               |   |             |             |    |     |    |             |   |               |     |     |     |  |  |
| 4 | Layanan Hubungan Media   | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah             | 5 jenis   | 3,409,864,200 | 5 | 2,059,074,898 | 5 | 1,126,844,400 | 5 | 325,091,094 | 452,915,440 | -  | -   | 5  | 778,006,534 | 5 | 2,837,081,432 | 67% | 83% | IKP |  |  |
|   |  | Jumlah pertemuan jumpa pers                                 | 16 kali   |               | - | 4             | 2 | 2             | 2 | 2           | 8           | 8  | 50% |    |             |   |               |     |     |     |  |  |
|   |  | Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah                    | 4 edisi   |               |   |               |   |               |   |             |             |    |     |    |             |   |               |     |     |     |  |  |
|   |  | Jumlah Layanan Hubungan Media                               | 5 layanan   |               |   |               |   |               |   |             |             |    |     |    |             |   |               |     |     |     |  |  |
|   | Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia sektoral | persentase elemen data statistik sektoral yang terpublikasi | 100%  |               |   |               |   | 100%          |   |             |             | 0% | 0%  | 0% | 0%          |   |               |     |     |     |  |  |



|    |  |  |  |           |             |     |            |      |            |      |   |   |            |    |   |      |   |    |            |      |            |      |     |       |
|----|--|--|--|-----------|-------------|-----|------------|------|------------|------|---|---|------------|----|---|------|---|----|------------|------|------------|------|-----|-------|
| V  |  | PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN<br>STATISTIK<br>SEKTORAL  | jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah | 100%      | 111,110,800 | 58% | 49,010,250 | 100% | 23,320,000 | 100% | - | - | 18,877,500 | 0% | - | 0%   | - | 0% | 18,877,500 | 100% | 67,887,750 | 100% | 68% | E-Gov |
|    |  |  | jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan evaluasi pembangunan daerah    | 100%      |             |     |            | 100% |            |      |   |   |            |    |   | 100% |   |    |            |      | 100%       |      |     |       |
| 11 |  | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 8 dokumen | 111,110,800 | 5   | 49,010,250 | 3    | 23,320,000 | -    | - | 2 | 18,877,500 | -  | - | 1    | - | 3  | 18,877,500 | 8    | 67,887,750 | 88%  | 68% | E-Gov |
| 1  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 8 dokumen | 94,310,800  | 5   | 45,047,750 | -    | 23,320,000 | -    | - | 2 | 18,877,500 | -  | - | -    | 2 |    | 18,877,500 | 7    | 63,925,250 | 88%  | 68% | E-Gov |

|                                       |  |  |   |           |                |                |     |               |    |               |     |               |    |    |     |   |      |               |      |                |     |     |  |
|---------------------------------------|--|--|---|-----------|----------------|----------------|-----|---------------|----|---------------|-----|---------------|----|----|-----|---|------|---------------|------|----------------|-----|-----|--|
|                                       |  |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 6 dokumen |                |                |     |               |    |               |     |               |    |    |     |   |      |               |      |                |     |     |  |
|                                       |  |  |   | -         | 27,194,371,824 | 16,802,542,670 | 137 | 5,125,628,401 | 1  | 1,614,430,481 | 76  | 2,260,827,116 | 89 | -  | 102 | - | 152  | 3,875,257,597 | 153  | 20,677,800,267 | 90% | 57% |  |
| Rata-rata capaian kinerja %           |  |  |   |           |                |                |     |               | 1% | 31%           | 55% | 44%           | 0% | 0% |     |   | 111% | 76%           | 111% | 76%            |     |     |  |
| Prediet Kinerja                       |  |  |   |           |                |                |     |               |    |               |     |               |    |    |     |   |      |               |      |                |     |     |  |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja |  |  |   |           |                |                |     |               |    |               |     |               |    |    |     |   |      |               |      |                |     |     |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja  |  |  |   |           |                |                |     |               |    |               |     |               |    |    |     |   |      |               |      |                |     |     |  |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, pelaksanaan kegiatan sudah terealisasi secara fisik sebesar 58% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.805.801.398 atau 42%. Untuk capaian realisasi indikator kinerja utama, dari 4 IKU yang ada pada Dinas Kominfo baru 1 (satu) indikator yang sudah didapatkan realisasinya yakni persentase data statistik sektoral yang terpublikasi yakni sebanyak 100%. Sementara untuk indikator indeks SPBE, persentase pemeringkatan keterbukaan informasi publik dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur Kominfo sampai baru akan selesai dilaksanakan dan didapatkan hasilnya pada triwulan IV.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2022 sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Kominfo 2018-2023 adalah cukup baik dimana ada beberapa capaian yang sudah melebihi target. Lebih lanjut terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

| No  | Indikator   | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra<br>Perangkat Daerah |      |      |      | Realisasi capaian tahun<br>ke- |      | Proyeksi |                   | Catatan<br>Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------|----------|-------------------|---------------------|
|     |   |                             |     | 2022                               | 2023 | 2024 | 2025 | 2022                           | 2023 | (n) 2024 | (thn n+1)<br>2025 |                     |
| (1) | (2)   | (3)                         | (4) | (5)                                | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                            | (10) | (12)     | (13)              | (14)                |
| 1.  | Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |                             |     | 2,25                               | 2,6  |      |      | 2,81                           | 2,9  | 3        | 3,1               |                     |
| 2   | Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik   |                             |     | 93%                                | 94%  |      |      | 99,92%                         | 100% | 100%     | 100%              |                     |
| 3.  | Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi  |                             |     | 83%                                | 100% |      |      | 100%                           | 100% | 100%     | 100%              |                     |
| 4.  | Nilai IKM Kominfo                                     |                             |     | 86                                 | 87   |      |      | 80,98                          | 87   | 88       | 89                |                     |

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis yang ada pada Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas konten dan layanan audio visual dan multimedia dalam rangka keterbukaan informasi publik.
3. Penyediaan data statistik sektoral yang mudah diakses oleh masyarakat guna percepatan Satu Data Indonesia.
4. Peningkatan SDM dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**

Dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 9.015.930.187. Dibandingkan dengan pagu pada APBD awal TA 2023 sebesar Rp. 8.372.480.204,- yang mengalami refocusing melalui pergeseran APBD menjadi Rp. 7.844.150.674 terjadi penambahan belanja sebesar Rp.643.449.983. Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2023 dan hasil analisa kebutuhan untuk perubahan Anggaran 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3

## Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Rancangan RKPD   |        |   |             |           |                |                        |  | Hasil Analisis Kebutuhan |   |           |                   |                    |
|------|--|--------|---|-------------|-----------|----------------|------------------------|--|--------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|
|      | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | lokasi | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target 2023 |           | Pagu Indikatif |                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | lokasi                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Target    | Kebutuhan<br>Dana | Catatan<br>Penting |
|      |  |        |   | Awal        | Perubahan | RKPD 2023      | RKPD 2023<br>Perubahan |  |                          |   | Perubahan |                   |                    |
| 2    |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  | 1      |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  | 1      | 2:02  | ##          |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  | 1      | 2:02  | ##          |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  | 1      | 2:06  | ##          |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
| 2    | #  | 1      | 2:06  | ##          |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |
|      |  |        |   |             |           |                |                        |  |                          |   |           |                   |                    |

|   |   |   |      |    |   |                |  |             |             |             |             |   |                |  |             |             |
|---|---|---|------|----|---|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|--|-------------|-------------|
| 2 | # | 1 | 2:06 | ## | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | padang panjang | Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan   | 7 Jenis     | 7 Jenis     | 21,112,050  | 21,103,900  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | padang panjang | Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan   | 7 Jenis     | 21,103,900  |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat                                 | 2 Jenis     | 2 Jenis     |             |             |   |                | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat                                 | 2 Jenis     |             |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 9 Paket     | 9 Paket     |             |             |   |                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 9 Paket     |             |
| 2 | # | 1 | 2:06 | ## | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | padang panjang | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 15,023,700  | 15,023,450  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | padang panjang | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | 3 Jenis     | 15,023,450  |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3 Paket     | 3 Paket     |             |             |   |                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3 Paket     |             |
| 2 | # | 1 | 2:06 | ## | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | padang panjang | Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalan dan luar daerah                      | 125 Ok      | 125 Ok      | 285,000,000 | 265,479,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | padang panjang | Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalan dan luar daerah                      | 125 Ok      | 265,479,000 |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 125 Laporan | 125 Laporan |             |             |   |                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 125 Laporan |             |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah makan minum rapat yang disediakan   | 2000 Ok     | 2000 Ok     |             |             |   |                | Jumlah makan minum rapat yang disediakan   | 2000 Ok     |             |
| 2 | # | 1 | 2:08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah                         | 100 %       | 100 %       | 298,878,400 | 306,318,400 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah                         | 100 %       | 306,318,400 |
| 2 | # | 1 | 2:08 | ## | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 110,000,000 | 110,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan   | 110,000,000 |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan   | 3 Rekening  | 3 Rekening  |             |             |   |                | Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan   | 3 Rekening  |             |
| 2 | # | 1 | 2:08 | ## | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                | Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan  | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 188,878,400 | 196,318,400 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                | Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan  | 3 Jenis     | 196,318,400 |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan   | 3 Laporan   |             |             |   |                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan   |             |
|   |   |   |      |    |   |                | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 8 Orang     | 8 Orang     |             |             |   |                | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 8 Orang     |             |
| 2 | # | 1 | 2:09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                    | 100 %       | 100 %       | 191,084,000 | 145,476,800 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                    | 100 %       | 145,476,800 |

|   |   |   |      |    |   |   |                        |                   |                      |                      |   |   |                   |                      |
|---|---|---|------|----|---|---|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| 2 | # | 1 | 2:09 | ## | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 7 Unit                 | 7 Unit            | 97,984,000           | 82,388,800           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            | 7 Unit            | 82,388,800           |
| 2 | # | 1 | 2:09 | ## | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            | 7 Unit                 | 7 Unit            | 4,780,000            | 4,780,000            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            | 7 Unit            | 4,780,000            |
| 2 | # | 1 | 2:09 | ## | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit                 | 1 Unit            | 61,876,000           | 31,868,000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit            | 31,868,000           |
| 2 | # | 1 | 2:09 | ## | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    | 7 Unit                 | 7 Unit            | 26,444,000           | 26,440,000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                    | 7 Unit            | 26,440,000           |
| 2 | # | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>                                     | <b>50 %</b>            | <b>50 %</b>       | <b>1,751,184,600</b> | <b>2,499,998,080</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>                                     | <b>50 %</b>       | <b>2,702,189,450</b> |
| 2 | # | 2 | 2:01 |    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang</b>                                     | <b>2339973400 kali</b> | <b>85000 kali</b> | <b>1,751,184,600</b> | <b>2,499,998,080</b> | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang</b>                                     | <b>85000 kali</b> | <b>2,702,189,450</b> |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                   | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 194,428,000          | 276,654,500          | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                   | 1 Dokumen         | 276,654,000          |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah konten videotron   | 850 Konten             | 850 Konten        |                      |                      |   | Jumlah konten videotron   | 850 Konten        |                      |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik   | 24 OPD                 | 24 OPD            |                      |                      |   | Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik   | 24 OPD            |                      |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan  | 5 Orang                | 5 Orang           |                      |                      |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan  | 5 Orang           |                      |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 307,310,400          | 418,754,000          | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 1 Dokumen         | 418,754,000          |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial | 1000 Release           | 1000 Release      |                      |                      |   | Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial | 1000 Release      |                      |



|   |   |   |      |    |  |   |                    |                    |                      |                      |  |   |                    |                      |   |
|---|---|---|------|----|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|---|--------------------|----------------------|---|
|   |   |   |      |    |  | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 0 Jenis            | 0 Jenis            |                      |                      |  | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 0 Jenis            |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif  | 0 Kali             | 0 Kali             |                      |                      |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif  | 0 Kali             |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi   | 0 Kali             | 0 Kali             |                      |                      |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi   | 0 Kali             |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah   | 0 Edisi            | 0 Edisi            |                      |                      |  | Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah   | 0 Edisi            |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 0 Kali             | 0 Kali             |                      |                      |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 0 Kali             |                      |   |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Layanan Hubungan Media   | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 5 Edisi            | 5 Edisi            | 1,213,251,200        | 1,800,589,580        | Layanan Hubungan Media   | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 5 Edisi            | 1,978,377,700        | Penambahan kecukupan langganan koran dan media online |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 5 Layanan          | 5 Layanan          |                      |                      |  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 5 Layanan          |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah  | 2 Edisi            | 2 Edisi            |                      |                      |  | Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah  | 2 Edisi            |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 8 Kali             | 8 Kali             |                      |                      |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 8 Kali             |                      |   |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 36,195,000           | 4,000,000            | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen          | 28,403,750           |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah KIM yang aktif   | 2 Kelompok         | 2 Kelompok         |                      |                      |  | Jumlah KIM yang aktif   | 2 Kelompok         |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah konten positif   | 20 Konten          | 0 Konten           |                      |                      |  | Jumlah konten positif   | 0 Konten           |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah media tradisional yang dibina  | 1 Kelompok         | 0 Kelompok         |                      |                      |  | Jumlah media tradisional yang dibina  | 0 Kelompok         |                      |   |
|   |   |   |      |    |  | Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan  | 1 Kegiatan         | 1 Kegiatan         |                      |                      |  | Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan  | 1 Kegiatan         |                      |   |
| 2 | # | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                          | <b>Indeks implementasi layanan SPBE</b>   | <b>3,55 Indeks</b> | <b>3,55 Indeks</b> | <b>2,623,967,200</b> | <b>2,669,381,920</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                          | <b>Indeks implementasi layanan SPBE</b>   | <b>3,55 Indeks</b> | <b>2,791,593,800</b> |   |
|   |   |   |      |    |  | <b>Indeks implementasi tata kelola SPBE</b>   | <b>2.15 Indeks</b> | <b>2.15 Indeks</b> |                      |                      |  | <b>Indeks implementasi tata kelola SPBE</b>   | <b>2.15 Indeks</b> |                      |   |
| 2 | # | 3 | 2:02 |    | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi  | 20 Layanan         | 20 Layanan         | 2,623,967,200        | 2,669,381,920        | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi  | 20 Layanan         | 2,791,593,800        |   |
| 2 | # | 3 | 2:02 | ## | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                    | 20 Unit            | 20 Unit            | 331,113,600          | 310,076,800          | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                    | 20 Unit            | 310,076,800          |   |

|   |   |   |      |    |   |  |              |              |                   |                   |   |  |              |                   |  |
|---|---|---|------|----|---|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--|
|   |   |   |      |    |   | Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   | 20 Layanan   | 20 Layanan   |                   |                   |   | Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   | 20 Layanan   |                   |  |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 7 Orang      | 7 Orang      |                   |                   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 7 Orang      |                   |  |
| 2 | # | 3 | 2:02 | ## | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah         | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen    | 1 Dokumen    | 2,292,853,600     | 2,359,305,120     | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah         | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen    | 2,481,517,000     | Penambahan kecukupan belanja internet dan gaji THL |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola   | 7 Jenis      | 7 Jenis      |                   |                   |   | Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola   | 7 Jenis      |                   |  |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 14 Orang     | 14 Orang     |                   |                   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   | 14 Orang     |                   |  |
| 2 | # |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |              |              | <b>39,980,000</b> | <b>29,980,000</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |  |              | <b>29,980,000</b> |  |
| 2 | # | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasi</b>  | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | <b>39,980,000</b> | <b>29,980,000</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasi</b>  | <b>100 %</b> | <b>29,980,000</b> |  |
| 2 | # | 2 | 2:01 |    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 2 Dokumen    | 2 Dokumen    | 39,980,000        | 29,980,000        | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 2 Dokumen    | 29,980,000        |  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      | 3 Dokumen    | 3 Dokumen    | 29,980,000        | 29,980,000        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      | 3 Dokumen    | 29,980,000        |  |
|   |   |   |      |    |   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 3 Dokumen    | 3 Dokumen    |                   |                   |   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan  | 3 Dokumen    |                   |  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      | 24 Orang     | 24 Orang     | 10,000,000        | -                 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      | 24 Orang     | -                 |  |
|   |   |   |      |    |   | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                    | 1 Kegiatan   | 1 Kegiatan   |                   |                   |   | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                    | 1 Kegiatan   |                   |  |

|   |   |   |      |    |  |  |   |            |            |            |                                       |  |   |            |            |
|---|---|---|------|----|--|--|---|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|---|------------|------------|
|   |   |   |      |    |  | Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan  | 1 kali  | 0 Kali     |            |            |                                       | Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan  | 0 Kali  |            |            |
| 2 | # |   |      |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |            | 11,950,000 | 11,942,000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN |  |   | 11,942,000 |            |
| 2 | # | 2 |      |    |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital                                    | 100 %      | 100 %      | 11,950,000 | 11,942,000                            | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital                                    | 100 %      | 11,942,000 |
| 2 | # | 2 | 2:01 |    |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Pelatihan  | 1 Kali     | 1 Kali     | 11,950,000 | 11,942,000                            | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Pelatihan  | 1 Kali     | 11,942,000 |
| 2 | # | 2 | 2:01 | ## |  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 11,950,000 | 11,942,000                            | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan  | 11,942,000 |
|   |   |   |      |    |  |  | Jumlah Pelatihan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |            |                                       |  | Jumlah Pelatihan  | 1 Kegiatan |            |

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap kecukupan anggaran belanja pada perubahan anggaran tahun 2023 yang diperkirakan sebesar Rp 9.340.333.437, dibandingkan dengan alokasi anggaran pada perubahan RKPD belum mencukupi kebutuhan belanja sebesar Rp. 324.403.250. Kekurangan anggaran ini berada pada beberapa kegiatan diantaranya :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Layanan Hubungan Media** berupa penambahan biaya belanja spanduk/baliho, langganan koran dan pariwisata. Hal ini dikarenakan anggaran belanja untuk kegiatan tersebut belum mencukupi dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tahun berjalan. Dari Pagu RKPD sebesar Rp. 1.800.589.580 masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 177.788.120,-
- 2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah** masih membutuhkan penambahan anggaran terkait dengan kecukupan gaji THL tenaga jaringan dan operator Command Centre. Dari Pagu RKPD sebesar Rp. 2.359.305.120 masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 122.211.180.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN dan BPS agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

##### 3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo, antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos

5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

### **3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara,**

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian,

- operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

### **3.1.3 Badan Pusat Statistik**

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

### **3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat**

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
  - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
  - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;



- c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
    - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
    - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
    - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
    - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
  3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
    - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
    - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
    - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
    - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
    - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;

- f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
  - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
  - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
  - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dan visi misi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Dalam RPJPD Kota Padang Panjang, tahun 2022 merupakan periode lima tahun keempat (2019-2023) Kota Padang Panjang, dimana pada masa ini Kota Padang Panjang berada pada tahap persiapan menuju kondisi Kota yang maju

dengan menekankan peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sementara berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2019-2023, pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan mengusung tema **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”**. Sebagai penjabaran visi tersebut dirumuskanlah beberapa misi dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023, prioritas pembangunan kota Padang Panjang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
6. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya
7. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, berkaitan erat dengan pencapaian misi ketiga Walikota yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif**, yang dirumuskan melalui pencapaian sasaran **“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

**“ Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi”**

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang responsif, efisien, efektif, transparan dan partisipatif berbasis tekhnologi informasi
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

3. Tersedianya data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia.
4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Kominfo

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023, yang meliputi 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Padang Panjang**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Rencana Tahun 2023 |             |                   | Pagu               |                           | Sumb<br>er<br>Dana | Catat<br>an<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                         |                   |                    |                   |
|------|---|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|      |   |  | Lokasi             | Target 2023 |                   | APBD<br>2023       | RKPD<br>2023<br>Perubahan |                    |                            | Target   | Pagu<br>Indikatif |                    |                   |
|      |   |  |                    | Semula      | Menjadi           |                    |                           |                    |                            |  |                   |                    |                   |
| 1    | 2   | 3  | 4                  | 5           | 6                 | 7                  | 8                         | 9                  | 10                         | 11   | 12                |                    |                   |
| 2    |   |  |                    |             |                   |                    | 9,015,930,1<br>87         |                    |                            |  |                   |                    |                   |
| 2    | #   |  |                    |             |                   | 8,330,558,2<br>04  | 8,974,008,1<br>87         |                    |                            |  | 7,844,874,2<br>10 |                    |                   |
| 2    | #   | 1  |                    |             |                   | 3,817,035,4<br>54  | 3,804,628,1<br>87         |                    |                            | 100 %  | 3,457,222,4<br>10 |                    |                   |
| 2    | #   | 1  | 2:0<br>2           |             | Padang<br>Panjang | 100 %              | 100 %                     | 3,042,844,9<br>04  | 3,043,085,6<br>37          |  | 100 %             | 2,637,976,4<br>60  |                   |
| 2    | #   | 1  | 2:0<br>2           | #           | Perangkat Daerah  |                    |                           | 3,042,844,9<br>04  | 3,043,085,6<br>37          | Dana<br>Transf<br>er<br>Umum<br>-Dana<br>Alokas<br>i<br>Umum | 0                 | 25 Orang/bu<br>lan | 2,637,976,4<br>60 |
|      |   |  |                    |             |                   | 25 Orang/bul<br>an | 25 Orang/bu<br>lan        |                    |                            |  |                   |                    |                   |
|      |   |  |                    |             |                   | 14 bulan           | 14 bulan                  |                    |                            |  |                   | -                  |                   |

|   |   |   |          |   |   |   |  |             |             |                 |                 |  |   |             |                 |
|---|---|---|----------|---|---|---|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|---|-------------|-----------------|
| 2 | # | 1 | 2:0<br>6 |   | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>Pemenuhan<br>Layanan<br>Administrasi<br>Perkantoran                                 |  | 100 %       | 100 %       | 329,835,35<br>0 | 309,747,35<br>0 |  |   | 100 %       | 329,283,55<br>0 |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>6 | # | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah jenis<br>komponen listrik<br>yang diadakan   |  | 4 Jenis     | 4 Jenis     | 8,141,000       | 8,141,000       | Dana<br>Transf<br>er<br>Umum<br>-Dana<br>Alokas<br>i<br>Umum | 0 | 4 Jenis     | 8,147,850       |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan |  | 4 Paket     | 4 Paket     |                 |                 |  |   | 4 Paket     |                 |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>6 | # | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Alat tulis<br>Kantor yang<br>disediakan  |  | 7 Jenis     | 7 Jenis     | 21,103,900      | 21,103,900      | Dana<br>Transf<br>er<br>Umum<br>-Dana<br>Alokas<br>i<br>Umum | 0 | 7 Jenis     | 21,112,000      |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah jenis bahan<br>pendukung<br>penyediaan surat<br>menyurat                                   |  | 2 Jenis     | 2 Jenis     |                 |                 |  |   | 2 Jenis     |                 |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                       |  | 9 Paket     | 9 Paket     |                 |                 |  |   | 9 Paket     |                 |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>6 | # | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah jenis<br>penyediaan barang<br>cetakan dan<br>penggandaan                                   |  | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 15,023,450      | 15,023,450      | Dana<br>Transf<br>er<br>Umum<br>-Dana<br>Alokas<br>i<br>Umum | 0 | 3 Jenis     | 15,023,700      |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                              |  | 3 Paket     | 3 Paket     |                 |                 |  |   | 3 Paket     |                 |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>6 | # | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                | Jumlah<br>keikutsertaan<br>dalam rapat<br>koordinasi dalan<br>dan luar daerah                     |  | 125 Ok      | 125 Ok      | 285,567,00<br>0 | 265,479,00<br>0 | Dana<br>Transf<br>er<br>Umum<br>-Dana<br>Alokas<br>i<br>Umum | 0 | 125 Ok      | 285,000,00<br>0 |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                   |  | 125 Laporan | 125 Laporan |                 |                 |  |   | 125 Laporan |                 |

|   |   |   |      |   |   |  |   |            |            |             |             |                                       |   |            |             |
|---|---|---|------|---|---|--|---|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|-------------|
|   |   |   |      |   |   | Jumlah makan minum rapat yang disediakan   |   | 2000 Ok    | 2000 Ok    |             |             |                                       |   | 2000 Ok    |             |
| 2 | # | 1 | 2:08 |   |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b> | %          | 100 %      | 100 %       | 298,878,400 | 306,318,400                           |   | 100 %      | 298,878,400 |
| 2 | # | 1 | 2:08 | # | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |   | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 110,000,000 | 110,000,000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 3 Laporan  | 110,000,000 |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan   |   | 3 Rekening | 3 Rekening |             |             |                                       |   | 3 Rekening |             |
| 2 | # | 1 | 2:08 | # | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan  |   | 3 Jenis    | 3 Jenis    | 188,878,400 | 196,318,400 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 3 Jenis    | 188,878,400 |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |   | 3 Laporan  | 3 Laporan  |             |             |                                       |   | 3 Laporan  |             |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |   | 8 Orang    | 8 Orang    |             |             |                                       |   | 8 Orang    |             |
| 2 | # | 1 | 2:09 |   |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>           | <b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>            | %          | 100 %      | 100 %       | 145,476,800 | 145,476,800                           |   | 100 %      | 191,084,000 |

|   |   |   |          |        |   |  |      |                 |            |               |               |                                       |   |            |               |
|---|---|---|----------|--------|---|--|------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|---------------|
| 2 | # | 1 | 2:0<br>9 | #<br># | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |      | 7 Unit          | 7 Unit     | 82,388,800    | 82,388,800    | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 7 Unit     | 97,984,000    |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>9 | #<br># | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |      | 7 Unit          | 7 Unit     | 4,780,000     | 4,780,000     | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 7 Unit     | 4,780,000     |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>9 | #<br># | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |      | 1 Unit          | 1 Unit     | 31,868,000    | 31,868,000    | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 1 Unit     | 61,876,000    |
| 2 | # | 1 | 2:0<br>9 | #<br># | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |      | 7 Unit          | 7 Unit     | 26,440,000    | 26,440,000    | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 7 Unit     | 26,444,000    |
| 2 | # | 2 |          |        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>                          | %    | 50 %            | 50 %       | 2,300,846,250 | 2,499,998,080 |                                       |   | 50 %       | 1,763,684,600 |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 |        | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang</b>                          | kali | 2339973400 kali | 85000 kali | 2,300,846,250 | 2,499,998,080 |                                       |   | 85000 kali | 1,763,684,600 |



|   |   |   |          |        |  |   |              |              |                 |                 |                                       |   |              |                 |
|---|---|---|----------|--------|--|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------|-----------------|
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | #<br># | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                   | 1 Dokumen    | 1 Dokumen    | 251,880,90<br>0 | 276,654,50<br>0 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 0 Dokumen    | 194,428,00<br>0 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah konten videotron   | 850 Konten   | 850 Konten   |                 |                 |                                       |   | 850 Konten   |                 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik   | 24 OPD       | 24 OPD       |                 |                 |                                       |   | 24 OPD       |                 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan  | 5 Orang      | 5 Orang      |                 |                 |                                       |   | 5 Orang      |                 |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | #<br># | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 1 Dokumen    | 1 Dokumen    | 507,310,40<br>0 | 418,754,00<br>0 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 0 Dokumen    | 307,310,40<br>0 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial | 1000 Release | 1000 Release |                 |                 |                                       |   | 1000 Release |                 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 0 Jenis      | 0 Jenis      |                 |                 |                                       |   |              |                 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif  | 0 Kali       | 0 Kali       |                 |                 |                                       |   |              |                 |
|   |   |   |          |        |  | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi   | 0 Kali       | 0 Kali       |                 |                 |                                       |   |              |                 |

|   |   |   |          |   |  |   |            |            |               |               |                                       |   |            |               |
|---|---|---|----------|---|--|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|------------|---------------|
|   |   |   |          |   |  | Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah   | 0 Edisi    | 0 Edisi    |               |               |                                       |   |            |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 0 Kali     | 0 Kali     |               |               |                                       |   |            |               |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | # | Layanan Hubungan Media   | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   | 5 Edisi    | 5 Edisi    | 1,513,251,200 | 1,800,589,580 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 5 Edisi    | 1,225,751,200 |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 5 Layanan  | 5 Layanan  |               |               |                                       |   | 0 Layanan  |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah  | 2 Edisi    | 2 Edisi    |               |               |                                       |   | 2 Edisi    |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah pertemuan jumpa pers   | 8 Kali     | 8 Kali     |               |               |                                       |   | 8 Kali     |               |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | # | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 28,403,750    | 4,000,000     | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0 | 1 Dokumen  | 36,195,000    |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah KIM yang aktif   | 2 Kelompok | 2 Kelompok |               |               |                                       |   | 2 Kelompok |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah konten positif   | 20 Konten  | 0 Konten   |               |               |                                       |   | 0 Konten   |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah media tradisional yang dibina  | 1 Kelompok | 0 Kelompok |               |               |                                       |   | 0 Kelompok |               |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan  | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |               |               |                                       |   | 1 Kegiatan |               |

|   |   |   |      |   |   |  |             |             |             |               |               |                                       |             |               |               |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 2 | # | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>   | Indeks implementasi layanan SPBE   | 3,55 Indeks | 3,55 Indeks | 3,55 Indeks | 2,212,676,500 | 2,669,381,920 |                                       | 3,55 Indeks | 2,623,967,200 |               |
|   |   |   |      |   |   | Indeks implementasi tata kelola SPBE   | 2.15 Indeks | 2.15 Indeks | 2.15 Indeks |               |               |                                       | 2.15 Indeks |               |               |
| 2 | # | 3 | 2:02 |   | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 2,212,676,500 | 2,669,381,920 |                                       | 20 Layanan  | 2,623,967,200 |               |
| 2 | # | 3 | 2:02 | # | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     |             | 20 Unit     | 20 Unit     | 310,113,600   | 310,076,800   | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0           | 0 Unit        | 331,113,600   |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   |             | 20 Layanan  | 20 Layanan  |               |               |                                       |             | 20 Layanan    |               |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |             | 7 Orang     | 7 Orang     |               |               |                                       |             | 7 Orang       |               |
| 2 | # | 3 | 2:02 | # | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |             | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1,902,562,900 | 2,359,305,120 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0           | 0 Dokumen     | 2,292,853,600 |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola   |             | 7 Jenis     | 7 Jenis     |               |               |                                       |             | 7 Jenis       |               |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |             | 14 Orang    | 14 Orang    |               |               |                                       |             | 14 Orang      |               |

|   |   |   |          |   |   |   |          |              |              |            |            |                                       |              |            |            |  |            |
|---|---|---|----------|---|---|---|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--|------------|
| 2 | # |   |          |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   |   |          |              |              | 29,980,000 | 29,980,000 |                                       |              | 39,980,000 |            |  |            |
| 2 | # | 2 |          |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasi</b>   | <b>%</b> | <b>100 %</b> | <b>100 %</b> | 29,980,000 | 29,980,000 |                                       | <b>100 %</b> | 39,980,000 |            |  |            |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 |   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan   | Dokumen  | 2 Dokumen    | 2 Dokumen    | 29,980,000 | 29,980,000 |                                       | 2 Dokumen    | 39,980,000 |            |  |            |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |          | 3 Dokumen    | 3 Dokumen    | 29,980,000 | 29,980,000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0            | 3 Dokumen  | 29,980,000 |  |            |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan   |          | 3 Dokumen    | 3 Dokumen    |            |            |                                       |              |            |            |  | 3 Dokumen  |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | # | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 |          | 24 Orang     | 24 Orang     | -          | -          | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0            | 24 Orang   | 10,000,000 |  |            |
|   |   |   |          |   |   | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi               |          | 1 Kegiatan   | 1 Kegiatan   |            |            |                                       |              |            |            |  | 1 Kegiatan |
|   |   |   |          |   |   | Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan   |          | 1 kali       | 0 Kali       |            |            |                                       |              |            |            |  |            |

|   |   |   |          |   |  |   |      |            |            |            |            |                                       |            |            |            |
|---|---|---|----------|---|--|---|------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2 | # |   |          |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |      |            |            | 11,942,000 | 11,942,000 |                                       | 11,950,000 |            |            |
| 2 | # | 2 |          |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital                                    | %    | 100 %      | 100 %      | 11,942,000 | 11,942,000 |                                       | 100 %      | 11,950,000 |            |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 |   | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Pelatihan  | Kali | 1 Kali     | 1 Kali     | 11,942,000 | 11,942,000 |                                       | 1 Kali     | 11,950,000 |            |
| 2 | # | 2 | 2:0<br>1 | # | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |      | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 11,942,000 | 11,942,000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | 0          | 1 Laporan  | 11,950,000 |
|   |   |   |          |   |  | Jumlah Pelatihan  |      | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |            |            |                                       |            | 1 Kegiatan |            |

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,**

**a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

**b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

ii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

**c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:**

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 4 sub kegiatan, antara lain :

i. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

ii. Pengelolaan Media Komunikasi.

iii. Layanan Hubungan Media.

iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

**3) Program Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.
- ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

**4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

**5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL 4.1**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023**



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Padang Panjang

Tahun 2023

| Kode | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian<br>RKPD<br>Tahun<br>2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target<br>RKPD<br>Tahun<br>2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                                |   |                |                   |                           |                   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju<br>Rencana Tahun 2024 |           | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>Jawab |        |                   |                   |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------|-------------------|-------------------|
|      |   |  |                                     |   |   | Target 2023   |   | Pagu Indikatif |                   |                           | Lokasi            |                     | Sumber<br>Dan<br>a                   | Prioritas |  | Target | Pagu<br>Indikatif |                   |
|      |   |  |                                     |   |   | Semula  | Menjadi   | RKPD<br>2023   | APBD<br>2023      | RKPD<br>2023<br>Perubahan |                   |                     |                                      | Nasional  |  |        |                   | Daerah            |
| 2    |   |  |                                     |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                |                   |                           |                   |                     |                                      |           |  |        |                   |                   |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 9,015,93          |                           |                   |                     |                                      |           |  |        |                   |                   |
| 2    | #   |  |                                     |   |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 |   |                | 7,844,87<br>4,236 | 8,330,55<br>8,204         | 8,974,00<br>8,187 |                     |                                      |           | 7,844,87<br>4,210                          |        |                   |                   |
| 2    | #   | 1  |                                     |   |   |   |   | 100 %          | 100 %             |                           |                   |                     |                                      | 100 %     |  |        |                   | 3,457,22<br>2,410 |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 3,469,72<br>2,436 | 3,817,03<br>5,454         | 3,804,62<br>8,187 |                     |                                      |           |  |        |                   |                   |
| 2    | #   | 1  | 2:02                                |   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah          | %              |                   | %                         | 100 %             | 100 %               |                                      |           | 100 %                                      |        |                   | 2,637,97<br>6,460 |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 2,650,47<br>6,460 | 3,042,84<br>4,904         | 3,043,08<br>5,637 |                     |                                      | 0         |  |        |                   | 25 Orang/bulan    |
| 2    | #   | 1  | 2:02                                | #   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN     |                |                   |                           | 25 Orang/bulan    | 25 Orang/bulan      |                                      |           | 0  |        |                   | 25 Orang/bulan    |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 2,650,47<br>6,460 | 3,042,84<br>4,904         | 3,043,08<br>5,637 |                     |                                      |           |  |        |                   | 2,637,97<br>6,460 |
|      |   |  |                                     |   |   |   | Jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan       |                |                   |                           | 14 bulan          | 14 bulan            |                                      |           |  |        |                   |                   |
| 2    | #   | 1  | 2:06                                |   |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | %              |                   | %                         | 100 %             | 100 %               |                                      |           | 100 %                                      |        |                   | 329,283,<br>550   |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 329,283,<br>576   | 329,835,<br>350           | 309,747,<br>350   |                     |                                      |           |  |        |                   |                   |
| 2    | #   | 1  | 2:06                                | #   |   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan           |                |                   |                           | 4 Jenis           | 4 Jenis             |                                      |           | 0  |        |                   | 4 Jenis           |
|      |   |  |                                     |   |   |   |   |                | 8,147,82<br>6     | 8,141,00<br>0             | 8,141,00<br>0     |                     |                                      |           |  |        |                   | 8,147,85<br>0     |

|   |   |   |      |   |   |  |  |         |         |            |            |            |  |  |                                      |  |  |   |         |            |  |  |  |                                  |
|---|---|---|------|---|---|--|--|---------|---------|------------|------------|------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---------|------------|--|--|--|----------------------------------|
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 4 Paket | 4 Paket |            |            |            |  |  | asi Umum                             |  |  |   |         |            |  |  |  |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:06 | # | Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan   |  | 7 Jenis | 7 Jenis | 21,112,050 | 21,103,900 | 21,103,900 |  |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0 | 7 Jenis | 21,112,000 |  |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat                             |  | 2 Jenis | 2 Jenis |            |            |            |  |  |                                      |  |  |   | 2 Jenis |            |  |  |  |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  | 9 Paket | 9 Paket |            |            |            |  |  |                                      |  |  |   | 9 Paket |            |  |  |  |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:06 | # | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan                             |  | 3 Jenis | 3 Jenis | 15,023,700 | 15,023,450 | 15,023,450 |  |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0 | 3 Jenis | 15,023,700 |  |  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |  | 3 Paket | 3 Paket |            |            |            |  |  |                                      |  |  |   | 3 Paket |            |  |  |  |                                  |

|   |   |   |      |   |   |  |   |  |   |             |             |             |             |             |  |                                      |  |  |             |             |             |                                  |
|---|---|---|------|---|---|--|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 2 | # | 1 | 2:06 | # | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah                      |   |  |   | 125 Ok      | 125 Ok      | 285,000,000 | 285,567,000 | 265,479,000 |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0           | 125 Ok      | 285,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |   |  |   | 125 Laporan | 125 Laporan |             |             |             |  |                                      |  |  | 125 Laporan |             |             |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah makan minum rapat yang disediakan   |   |  |   | 2000 Ok     | 2000 Ok     |             |             |             |  |                                      |  |  | 2000 Ok     |             |             |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:08 | # | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah                       | % |  | % | 100 %       | 100 %       | 298,878,400 | 298,878,400 | 306,318,400 |  |                                      |  |  | 100 %       | 298,878,400 |             |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:08 | # | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |   |  |   | 3 Laporan   | 3 Laporan   | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0           | 3 Laporan   | 110,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan   |   |  |   | 3 Rekening  | 3 Rekening  |             |             |             |  |                                      |  |  | 3 Rekening  |             |             |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:08 | # | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan  |   |  |   | 3 Jenis     | 3 Jenis     | 188,878,400 | 188,878,400 | 196,318,400 |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  | 0           | 3 Jenis     | 188,878,400 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |   |  |   | 3 Laporan   | 3 Laporan   |             |             |             |  |                                      |  |  | 3 Laporan   |             |             |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |   |  |   | 8 Orang     | 8 Orang     |             |             |             |  |                                      |  |  | 8 Orang     |             |             |                                  |

|   |   |   |      |   |   |  |          |  |          |             |             |                      |                      |                      |  |       |             |                      |                                  |
|---|---|---|------|---|---|--|----------|--|----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | # | 1 | 2:09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah  | %        |  | %        | 100 %       | 100 %       | 191,084,000          | 145,476,800          | 145,476,800          |  | 100 % | 191,084,000 |                      |                                  |
| 2 | # | 1 | 2:09 | # | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya |          |  |          | 7 Unit      | 7 Unit      | 97,984,000           | 82,388,800           | 82,388,800           |  | 0     | 7 Unit      | 97,984,000           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | # | 1 | 2:09 | # | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |          |  |          | 7 Unit      | 7 Unit      | 4,780,000            | 4,780,000            | 4,780,000            |  | 0     | 7 Unit      | 4,780,000            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | # | 1 | 2:09 | # | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              |          |  |          | 1 Unit      | 1 Unit      | 61,876,000           | 31,868,000           | 31,868,000           |  | 0     | 1 Unit      | 61,876,000           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | # | 1 | 2:09 | # | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        |          |  |          | 7 Unit      | 7 Unit      | 26,444,000           | 26,440,000           | 26,440,000           |  | 0     | 7 Unit      | 26,444,000           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | # | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>  | <b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>                          | <b>%</b> |  | <b>%</b> | <b>50 %</b> | <b>50 %</b> | <b>1,751,184,600</b> | <b>2,300,846,250</b> | <b>2,499,998,080</b> |  |       | <b>50 %</b> | <b>1,763,684,600</b> |                                  |

|   |   |   |      |   |   |   |      |  |      |                 |              |               |               |               |  |                                      |  |   |              |           |             |                                  |
|---|---|---|------|---|---|---|------|--|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 2 | # | 2 | 2:01 |   | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      | Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang          | kali |  | kali | 2339973400 kali | 85000 kali   | 1,751,184,600 | 2,300,846,250 | 2,499,998,080 |  |                                      | 85000 kali   | 1,763,684,600   |              |           |             |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |      |  |      | 1 Dokumen       | 1 Dokumen    | 194,428,000   | 251,880,900   | 276,654,500   |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya | 0            | 0 Dokumen | 194,428,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   | Jumlah konten videotron   |   |      |  |      | 850 Konten      | 850 Konten   |               |               |               |  |                                      |  |   | 850 Konten   |           |             |                                  |
|   |   |   |      |   | Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik   |   |      |  |      | 24 OPD          | 24 OPD       |               |               |               |  |                                      |  |   | 24 OPD       |           |             |                                  |
|   |   |   |      |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan  |   |      |  |      | 5 Orang         | 5 Orang      |               |               |               |  |                                      |  |   | 5 Orang      |           |             |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik            |      |  |      | 1 Dokumen       | 1 Dokumen    | 307,310,400   | 507,310,400   | 418,754,000   |  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan                  | 0            | 0 Dokumen | 307,310,400 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   | Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial |   |      |  |      | 1000 Release    | 1000 Release |               |               |               |  |                                      |  |   | 1000 Release |           |             |                                  |
|   |   |   |      |   | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah   |   |      |  |      | 0 Jenis         | 0 Jenis      |               |               |               |  |                                      |  |   |              |           |             |                                  |
|   |   |   |      |   | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif  |   |      |  |      | 0 Kali          | 0 Kali       |               |               |               |  |                                      |  |   |              |           |             |                                  |
|   |   |   |      |   | Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif  |   |      |  |      | 0 Kali          | 0 Kali       |               |               |               |  |                                      |  |   |              |           |             |                                  |

|   |   |   |      |   |   |  |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |  |   |   |   |             |                   |                                    |
|---|---|---|------|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---|-------------|-------------------|------------------------------------|
|   |   |   |      |   |   | melalui media televisive   |  |  |  |             |             |                   |                   |                   |  |   |   |   |             |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah  |  |  |  | 0 Edisi     | 0 Edisi     |                   |                   |                   |  |   |   |   |             |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah pertemuan jumpa pers  |  |  |  | 0 Kali      | 0 Kali      |                   |                   |                   |  |   |   |   |             |                   |                                    |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Layanan Hubungan Media  | Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah  |  |  |  | 5 Edisi     | 5 Edisi     | 1,213,25<br>1,200 | 1,513,25<br>1,200 | 1,800,58<br>9,580 |  | Dan a Transfer Umum- Dan a Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik | 0 | 5 Edisi     | 1,225,75<br>1,200 | DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah Layanan Hubungan Media  |  |  |  | 5 Layana n  | 5 Layana n  |                   |                   |                   |  |   |   |   | 0 Layana n  |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah   |  |  |  | 2 Edisi     | 2 Edisi     |                   |                   |                   |  |   |   |   | 2 Edisi     |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah pertemuan jumpa pers  |  |  |  | 8 Kali      | 8 Kali      |                   |                   |                   |  |   |   |   | 8 Kali      |                   |                                    |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminas ikan Informasi Program atau Kebijakan |  |  |  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 36,195,0<br>00    | 28,403,7<br>50    | 4,000,00<br>0     |  | Dan a Transfer Umum- Dan a Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik | 0 | 1 Dokumen   | 36,195,0<br>00    | DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah KIM yang aktif  |  |  |  | 2 Kelomp ok | 2 Kelomp ok |                   |                   |                   |  |   |   |   | 2 Kelomp ok |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah konten positif  |  |  |  | 20 Konten   | 0 Konten    |                   |                   |                   |  |   |   |   | 0 Konten    |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah media tradisional yang dibina   |  |  |  | 1 Kelomp ok | 0 Kelomp ok |                   |                   |                   |  |   |   |   | 0 Kelomp ok |                   |                                    |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan   |  |  |  | 1 Kegiata n | 1 Kegiata n |                   |                   |                   |  |   |   |   | 1 Kegiata n |                   |                                    |

|   |   |   |      |   |   |  |             |  |           |             |             |               |               |               |  |             |               |               |                                  |
|---|---|---|------|---|---|--|-------------|--|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 2 | # | 3 |      |   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA  | Indeks implementasi layanan SPBE   | 3,55 Indeks |  | - Indeks  | 3,55 Indeks | 3,55 Indeks | 2,623,967,200 | 2,212,676,500 | 2,669,381,920 |  | 3,55 Indeks | 2,623,967,200 |               |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Indeks implementasi tata kelola SPBE   | 2,15 Indeks |  | - Indeks  | 2,15 Indeks | 2,15 Indeks |               |               |               |  | 2,15 Indeks |               |               |                                  |
| 2 | # | 3 | 2:02 |   | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a                         | jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   | 20 Layanan  |  | - Layanan | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 2,623,967,200 | 2,212,676,500 | 2,669,381,920 |  | 20 Layanan  | 2,623,967,200 |               |                                  |
| 2 | # | 3 | 2:02 | # | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                      | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     |             |  |           | 20 Unit     | 20 Unit     | 331,113,600   | 310,113,600   | 310,076,800   |  | 0           | 0 Unit        | 331,113,600   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi   |             |  |           | 20 Layanan  | 20 Layanan  |               |               |               |  | 20 Layanan  |               |               |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |             |  |           | 7 Orang     | 7 Orang     |               |               |               |  | 7 Orang     |               |               |                                  |
| 2 | # | 3 | 2:02 | # | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |             |  |           | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 2,292,853,600 | 1,902,562,900 | 2,359,305,120 |  | 0           | 0 Dokumen     | 2,292,853,600 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola   |             |  |           | 7 Jenis     | 7 Jenis     |               |               |               |  | 7 Jenis     |               |               |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan   |             |  |           | 14 Orang    | 14 Orang    |               |               |               |  | 14 Orang    |               |               |                                  |

| 2 | # |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  |   |         |   |         |            | 39,980,000 | 29,980,000 | 29,980,000 |            |       | 39,980,000 |            |                                  |
|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|----------------------------------|
| 2 | # | 2 |      |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  | Persentase Data Statistik Sektoral yang Terpublikasi  | %       | % | 100 %   | 100 %      | 39,980,000 | 29,980,000 | 29,980,000 |            | 100 % | 39,980,000 |            |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 |   | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan   | Dokumen |   | Dokumen | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 39,980,000 | 29,980,000 | 29,980,000 |       | 2 Dokumen  | 39,980,000 |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |         |   |         | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 29,980,000 | 29,980,000 | 29,980,000 |       | 3 Dokumen  | 29,980,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan   |         |   |         | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |            |            |            |       | 3 Dokumen  |            |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 |         |   |         | 24 Orang   | 24 Orang   | 10,000,000 | -          | -          |       | 24 Orang   | 10,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   |   | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi               |         |   |         | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |            |            |            |       | 1 Kegiatan |            |                                  |
|   |   |   |      |   |   | Jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan   |         |   |         | 1 kali     | 0 Kali     |            |            |            |       |            |            |                                  |



|   |   |   |      |   |  |   |      |            |            |           |            |            |            |  |            |            |            |                                  |
|---|---|---|------|---|--|---|------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 2 | # |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |      |            |            |           | 11,950,000 | 11,942,000 | 11,942,000 |  |            | 11,950,000 |            |                                  |
| 2 | # | 2 |      |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI   | Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital                                    | %    | %          | 100 %      | 100 %     | 11,950,000 | 11,942,000 | 11,942,000 |  | 100 %      | 11,950,000 |            |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 |   | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a                  | Jumlah Pelatihan  | Kali | Kali       | 1 Kali     | 1 Kali    | 11,950,000 | 11,942,000 | 11,942,000 |  | 1 Kali     | 11,950,000 |            |                                  |
| 2 | # | 2 | 2:01 | # | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |      |            | 1 Laporan  | 1 Laporan | 11,950,000 | 11,942,000 | 11,942,000 |  | 0          | 1 Laporan  | 11,950,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|   |   |   |      |   | Jumlah Pelatihan   |   |      | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |           |            |            |            |  | 1 Kegiatan |            |            |                                  |

Dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, masih mengacu pada Renja awal dimana untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya meliputi 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Untuk indikator terdapat beberapa penyesuaian terhadap target kinerja yang disebabkan oleh berbagai pertimbangan atas kondisi yang terjadi terutama terkait dengan keterbatasan anggaran. Lebih lanjut masing masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 4 (empat) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.

**a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN sebanyak 14 (empat belas) bulan.

**b. Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah jenis pengadaan alat alat listrik sebanyak 4 jenis.
- ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
- iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan sebanyak 4 jenis dan jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat sebanyak 2 jenis.
- iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah sebanyak 125 ok dan Jumlah

jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 2000 ok.

**c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:

- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah tagihan rekening yang di bayarkan sebanyak 3 (tiga) rekening yakni rekening listrik, air dan telpon.
- ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan sebanyak 3 jasa layanan (kebersihan, sopir dan penjaga kantor) dan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 8 orang (4 orang tenaga kebersihan, 2 orang sopir dan 2 orang penjaga kantor).

**d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).
- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara pajak dan perizinannya sebanyak 7 (tujuh) unit.
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.
- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah jenis alat kantor yang terpelihara sebanyak 7 (tujuh) jenis.

**2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi

publik dengan target sebesar 50%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Rata-rata kunjungan pada laman resmi Kominfo Padang Panjang sebanyak 85.000 kunjungan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :

- i. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah konten videotron sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) konten, Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik sebanyak 24 (dua puluh empat) OPD.
- ii. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial sebanyak 1000 (seribu) release.
- iii. Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah jenis media informasi pembangunan daerah sebanyak 5 (lima) jenis, Jumlah pertemuan jumpa pers sebanyak 8 (delapan) kali , dan Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah sebanyak 2 (dua) edisi .
- iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator kinerja Jumlah KIM yang aktif sebanyak 2 (dua) KIM, Jumlah media tradisional yang dibina, sebanyak 1 (satu) kelompok, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah konten positif sebanyak 20 (dua puluh) konten .

**3) Program Aplikasi Informatika** dengan indikator kinerja berupa indeks implementasi tata kelola SPBE sebesar 2,15 dan indeks implementasi layanan SPBE sebesar 3,55. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebanyak 20 layanan.

- ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola sebanyak 7 (tujuh) jenis.

**4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor** dengan indikator Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi sebesar 100 % . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

**a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen.
- ii. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

**5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan indikator kinerja persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital sebanyak 100 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

**a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2023, berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada triwulan II, dimana setelah menganalisa berbagai faktor dan kondisi yang mungkin akan berpengaruh terhadap pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan maka dilakukanlah rasionalisasi dan penyesuaian agar tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka pada perubahan anggaran tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tetap melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan sebagaimana Rancangan awal Renja Tahun 2023, namun terdapat sedikit penyesuaian pada target kinerja. Penyesuaian dan rasionalisasi anggaran di beberapa sub kegiatan terpaksa dilakukan terkait dengan keterbatasan/refocusing anggaran pada akhir tahun 2023. Banyak upaya tetap harus dilakukan agar capaian kinerja tetap dapat maksimal diakhir periode Renstra 2018-2023.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Oktober 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**

  
**Drs. AMPERA, SH, M.Si**

NIP.19680101 199803 1 010